



PENGUATAN KAPASITAS DIGITAL DALAM MENGHADAPI TRANSFORMASI DIGITAL UNTUK MENUNJANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA

Rio Yusri Maulana¹, Dimas Subekti², Dinda Syufradian Putra³, Alva Beriansyah⁴, M. Yusuf⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Jambi

E-mail address: rioyusrimaulana@unja.ac.id

Abstract

In the context of current technological advances, digital-based governance is very important. Digital technology requires the government to quickly adapt and utilize it as a tool to increase effectiveness and efficiency in governance. Therefore, the government needs to prepare the capacity of the apparatus that will adopt technology in running government affairs. This is not only to prepare the existing apparatus, but also for the next generation who are able to run and develop digital governance, both at the national and local levels. This community service aims to train officials in the village so that they are insightfully ready to face digital transformation and are skilled in using digital technology that supports government administration. The results of the service showed that the apparatus realized the importance of digital literacy to support government activities that can facilitate service delivery. Although they realize that digital is important and are mentally prepared, the use of technology has not yet led to how to support performance in government administration in the village. In addition, digital transformation requires a long process because infrastructure and human resources are not yet adequately prepared. The weakness of this activity is that the initial mapping process has not been accurate, so problem-solving has not led to very specific and contextual problems that touch the fundamental problems of partners.

Keywords: Apparatus, capacity, digital transformation, ICT, mentoring, rural government

Abstrak

Dalam konteks kemajuan teknologi saat ini, penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital menjadi sangat penting. Teknologi digital menuntut pemerintah agar cepat beradaptasi dan memanfaatkannya sebagai alat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemerintahan. Oleh karena itu, penyelenggara pemerintahan perlu mempersiapkan kapasitas aparatur yang akan mengadopsi teknologi dalam menjalankan roda pemerintahan. Ini tidak hanya mempersiapkan aparatur yang sudah ada, tetapi juga untuk generasi penerus yang mampu menjalankan dan mengembangkan pemerintahan digital, baik di tingkat nasional maupun lokal. Kegiatan pendampingan ini

bertujuan untuk melatih aparatur desa agar secara wawasan mereka siap menghadapi transformasi digital dan terampil dalam menggunakan teknologi digital yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa aparatur menyadari pentingnya literasi digital untuk menunjang aktivitas pemerintah yang mampu mempermudah dalam penyelenggaraan layanan. Meskipun mereka menyadari bahwa digital penting dan secara mental mulai bersiaga, penggunaan teknologi belum mengarah pada bagaimana menunjang kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah di desa. Di samping itu, transformasi digital memerlukan proses yang panjang kerena kesiapan infrastruktur dan SDM belum memadai. Kelemahan kegiatan ini adalah proses pemetaan awal belum akurat sehingga pemecahan masalah belum mengarah kepada masalah yang sangat spesifik dan kontekstual yang menyentuh masalah fundamental mitra.

Kata Kunci: Aparatur, kapasitas, TIK, transformasi digital, pendampingan, pemerintah desa

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) adalah fenomena yang tak terelakkan dan menjadi indikator kemajuan suatu negara. Keduanya telah membentuk dunia dan berdampak luas, digunakan oleh pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kehadirannya berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik, yang menuntut tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini mengharuskan pegawai untuk meningkatkan profesionalisme, kapasitas, dan kualitas layanan yang mereka berikan kepada masyarakat (Maulana et al., 2023; Mutiarin et al., 2024).

Dalam pemberian layanan publik, teknologi informasi memainkan peranan yang dominan dalam mendukung sistem operasional dan manajerial di instansi pemerintah. Menyadari pentingnya peran sistem informasi dalam sistem pemerintahan dan didorong oleh perkembangan informasi dan teknologi yang semakin pesat, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan strategi nasional pengembangan pemerintahan berbasis elektronik melalui Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 sebagai kerangka hukum untuk semua kebijakan di bidang pemerintahan berbasis elektronik dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang secara eksplisit berbicara tentang teknologi tepat guna (Maulana & Bafadhal, 2020). Regulasi ini memberikan pijakan bagi pemerintah desa dalam melakukan transformasi digital dengan tahapan yang terukur.

Jelas bahwa produk hukum sebagai elemen dari transformasi digital sangat diperlukan untuk menerapkan pemerintahan digital. Ini dapat menjadi pedoman penyelenggaraan, perbaikan sistem, data center, jaringan intra-pemerintah, dan



aplikasi yang lebih terintegrasi dan tidak berbelit-belit, restrukturisasi birokrasi, peningkatan kompetensi di bidang TIK bagi birokrasi. Disamping itu, transformasi digital memerlukan perubahan budaya kerja yang mendorong para aparatur bekerja secara digital, pengembangan kepemimpinan dengan visi digital. Peningkatan kolaborasi sektoral dan membina kerja sama pemerintah dengan pihak swasta, serta penyediaan infrastruktur, terutama pemerataan akses internet hingga ke pelosok-pelosok mutlak harus dilakukan (Wagola et al., 2023).

Meskipun pemerintah pusat telah menetapkan kerangka regulasi, pada faktanya kesenjangan digital merupakan tantangan besar di berbagai daerah. Ini memerlukan penanganan khusus yang tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga dengan mempercepat literasi digital di kalangan masyarakat. Adaptasi dan peningkatan kapasitas digital sangat penting untuk memastikan publik dapat memanfaatkan teknologi secara efektif. Pemerintah perlu memperhatikan pemerataan infrastruktur yang memadai. Ini mencakup penyediaan jaringan internet yang cepat dan stabil, akses ke perangkat teknologi, serta fasilitas yang mendukung penggunaan TIK. Tanpa infrastruktur yang baik, masyarakat tidak dapat mengakses informasi dan layanan digital yang diperlukan. Infrastruktur saja tidak cukup, adaptasi dan percepatan kemampuan masyarakat di bidang digital juga sangat diperlukan. Kapasitas digital mencakup kemampuan individu untuk menggunakan teknologi secara efektif, memahami informasi digital, dan berpartisipasi dalam dunia digital. Masyarakat perlu dilatih dan diberdayakan agar dapat memanfaatkan teknologi dengan baik, sehingga mereka tidak hanya menjadi pengguna pasif, tetapi juga dapat berkontribusi secara aktif dalam ekonomi dan masyarakat digital (Maulana, 2022).

Faktanya, masalah literasi teknologi ternyata masih dihadapi oleh masyarakat terutama di daerah pinggiran dimana infrastruktur dan akses kurang memadai. Misalnya, kabupaten Merangin, merupakan salah satu daerah yang menghadapi berbagai permasalahan sosial. Tercatat, indeks pembangunan manusia (IPM) daerah ini hingga akhir tahun 2023 pada angka 70,81, yang menempatkannya sebagai yang terendah keempat dari 11 kabupaten/kota di provinsi Jambi dan di bawah indeks provinsi 72,77. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah menghadapi tantangan pada sektor pembangunan manusia, yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan pendapatan karena disebabkan beberapa faktor (Hidayat, 2024).

Faktor-faktor yang menyebabkan IPM di Merangin masih rendah antara lain adalah tingginya angka putus sekolah. Hingga tahun 2023, angka putus sekolah untuk tingkat sekolah menengah atas dan sederajat cukup mengkhawatirkan, mencapai 36,18%. Selain itu, angka putus sekolah untuk tingkat sekolah menengah pertama dan sederajat berada di sekitar 3,56%, sementara untuk tingkat sekolah dasar dan sederajat mencapai 2,51%. Tingginya angka putus sekolah ini

menunjukkan adanya tantangan dalam akses dan kualitas pendidikan di daerah tersebut, yang berdampak langsung pada pengembangan sumber daya manusia (Hidayat, 2024). Kondisi yang secara umum terjadi di daerah ini juga serupa dialami di desa-desa, Desa Kota Raja, Kecamatan Tabir Ilir sebagai kasus spesifik. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) ini berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintahan pada level desa.

Efek signifikan yang muncul terhadap penyelenggaraan pemerintahan disebabkan rendahnya SDM terutama di bidang teknologi digital dapat berupa menurunnya kinerja pemerintahan. Ini mengurangi efisiensi dan efektivitas dalam memberikan layanan kepada masyarakat, inovasi yang terbatas baik perumusan kebijakan maupun implementasi kebijakan, dan keterbukaan informasi publik yang terbatas. Titik krusialnya adalah lemahnya kapasitas digital akan menghambat transformasi digital, dan ketidakmampuan dalam beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas digital sangat penting bagi penyelenggara pemerintah desa. Meningkatkan kualitas SDM di bidang teknologi digital sangat penting untuk memastikan pemerintahan dapat berfungsi secara optimal dan memenuhi kebutuhan masyarakat di era digital ini. Dengan mengimplementasikan digitalisasi, desa dapat berkembang lebih cepat, lebih mandiri, dan lebih berdaya saing dalam era global yang semakin terhubung (Beriansyah et al., 2021).

Dalam rangka menjawab permasalahan krusial yang dihadapi oleh mitra dalam menjalankan pemerintahan secara digital, kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk melatih aparatur desa agar terampil dalam menggunakan teknologi digital yang dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan aparatur desa mampu memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Selain itu, aparatur desa dapat mengakses informasi dengan lebih cepat, berkomunikasi secara lebih efektif, serta mengelola data dan administrasi dengan lebih baik. Kegiatan pengabdian ini juga bertujuan untuk membekali aparatur desa dengan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di era digital, melakukan transformasi digital, sehingga mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan desa yang lebih baik.

Harapannya, kegiatan ini berdampak terhadap peningkatan kapasitas, kapabilitas dan pemahaman terhadap penggunaan digital untuk yang menunjang kehidupan. Dengan pelatihan yang diberikan, aparatur desa Kota Raja diharapkan mampu dan siap menghadapi transformasi digital dan meningkatkan kinerja mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini akan mendukung transisi menuju tata kelola pemerintahan digital yang berprinsip pada efektivitas dan efisiensi, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih



baik. Kemudian, Kegiatan ini juga akan berdampak pada meningkatnya pemahaman literasi digital bagi aparatur. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan internet dan teknologi digital, mereka dapat memanfaatkan sumber daya digital secara positif, baik untuk edukasi maupun pengembangan diri yang menunjang kinerja. Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pengembangan desa dan masyarakatnya.

METODE DAN PELAKSANAAN

Metode

Konsep pendampingan dari tim fasilitator adalah mendorong aparatur pemerintah desa meningkatkan kapasitas dan keterampilan mereka secara mandiri dalam menggunakan teknologi digital. Upaya ini bertujuan menciptakan penyelenggara yang peduli, berpengaruh, dan mampu mengelola sumber daya, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat. Tujuan utama pendampingan adalah membantu masyarakat dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang relevan dengan kehidupan mereka, serta mengurangi hambatan pribadi dan sosial yang menghalangi mereka dalam bertindak (Andreas & Savitri, 2016).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan *participatory learning and action*. Ini juga dikenal sebagai *learning by doing* atau belajar sambil bekerja, merupakan metode yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemberdayaan (Ibnouf et al., 2015). Melalui metode ini, tim memberikan pembekalan dengan cara ceramah, tutorial, curah pendapat, dan diskusi. Ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya keterampilan digital bagi aparatur pemerintah desa. Kemudian dilanjutkan dengan pelatihan atau demonstrasi penggunaan aplikasi penunjang dan manyajikan praktik baik dari berbagai daerah. Ini bertujuan untuk membangun hubungan yang efektif di antara anggota, sehingga mereka dapat bekerja sama dengan efisien dan efektif dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tim menetapkan pemerintah desa Kota Raja sebagai mitra dalam pelaksanaan kegiatan PPM dengan argumentasi bahwa mereka memiliki dua peran utama. Aparatur mampu berperan aktif, karena mitra berfungsi sebagai aktor utama yang secara langsung terlibat dalam kegiatan pemerintahan desa, baik dalam aspek teknis maupun non-teknis. Ini mencakup pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas. Di

samping itu, mitra juga sebagai masyarakat desa yang secara langsung berinteraksi dengan berbagai elemen sehingga mitra berkontribusi dengan memberikan masukan, berpartisipasi dalam diskusi, dan mendukung pelaksanaan kegiatan yang dirancang untuk memberdayakan masyarakat. Dengan kedua peran ini, pelaksanaan PPM dapat berjalan secara efektif dan memberikan dampak positif.

Pemerintah desa Kota Raja sebagai mitra pemberdayaan berada di Kecamatan Tabir Ilir, kabupaten Merangin. Secara umum, kabupaten Merangin memiliki luas wilayah 7.668,61 kilometer persegi, terbagi menjadi 24 kecamatan, dengan populasi sekitar 357.315 jiwa (2020). Geografisnya terdiri dari dataran tinggi yang subur dan dataran rendah yang dilalui sungai-sungai seperti Batang Tembesi, Batang Merangin, dan Batang Tabir. Ekonomi Kabupaten Merangin didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan jasa, dengan hasil pertanian utama seperti beras, jagung, cabai, dan kentang, serta komoditas unggulan perkebunan seperti kelapa sawit, karet, dan kopi (Henry, 2022).

Rendahnya indeks pembangunan manusia di kabupaten Merangin mencerminkan tantangan serius dalam kualitas hidup masyarakat. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap rendahnya indeks adalah kurangnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. Hal ini terutama dirasakan di desa-desa terpencil seperti desa Kota Raja, di mana infrastruktur kesehatan tidak memadai atau sulit dijangkau. Akibatnya, masyarakat di daerah tersebut mengalami kesulitan dalam mendapatkan perawatan kesehatan yang diperlukan, yang pada gilirannya menghambat peningkatan angka harapan hidup. Selain masalah kesehatan, daerah ini juga menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi. Pada tahun 2023, tercatat 35.190 jiwa atau sekitar 9,93% dari total populasi 354.052 jiwa hidup dalam kondisi miskin. Angka ini menunjukkan bahwa hampir satu dari sepuluh orang berada di bawah garis kemiskinan. Dalam konteks yang lebih luas, penduduk miskin di kabupaten ini menyumbang sekitar 12,54% dari total kemiskinan di Provinsi Jambi, yang memiliki 280.680 jiwa penduduk miskin (Hidayat, 2024). Ini menunjukkan bahwa meskipun Merangin adalah salah satu kabupaten di provinsi tersebut, kontribusinya terhadap total kemiskinan cukup signifikan, menyoroti perlunya intervensi dan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah ini.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dimulai dengan riset pendahuluan yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah utama yang dihadapi oleh penyelenggara pemerintahan di desa dan potensi yang dapat dikembangkan. Hasil riset menunjukkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah lemahnya literasi digital aparatur pemerintah desa. Ini terdeteksi dengan indikasi seperti kesulitan dalam pengolahan data atau manajemen data. Aparatur kurang terampil dalam mengoperasikan perangkat dan aplikasi yang diperlukan untuk tugas sehari-



hari di kantor, seperti pengolahan data, manajemen data atau file pemerintahan yang mendukung pekerjaan. Di samping itu, kelemahan tersebut juga berimplikasi pada kurangnya penggunaan data yang relevan untuk pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, langkah selanjutnya adalah menentukan satu tema khusus yang akan dijadikan sebagai isu sentral yang akan diselesaikan melalui kegiatan pengabdian. Pemilihan tema ini penting untuk fokus dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian, sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan bagi mitra. Tema yang dipilih dianggap relevan dengan permasalahan yang diidentifikasi dan potensi yang ada, serta mampu mendorong pengembangan kapasitas secara berkelanjutan.

Berangkat dari hasil riset awal, tim menawarkan alternatif pemecahan masalah kepada mitra yang sesuai dengan kondisi aktual, kebutuhan dan prioritas. Dari hasil dialog dengan pemangku kepentingan, maka tim dan mitra menyepakati untuk mengawali kegiatan pengabdian terhadap pelatihan peningkatan kapasitas dan pendampingan agar aparatur terampil dalam menggunakan teknologi penunjang kegiatan pemerintahan sehingga mereka memiliki kesiapan untuk menghadapi transformasi digital. Topik ini sangat relevan dengan perkembangan kajian di bidang pemerintahan elektronik, dimana ini telah menjadi konsen oleh para pengkaji yang mencurahkan perhatian terhadap penggunaan teknologi dan informasi di pemerintahan (Syahputra et al., 2023). Isu inilah yang menjadi basis bagi tim untuk melaksanakan kegiatan di lapangan dan semua kegiatan dilaksanakan atas dasar konsensus antara mitra dengan pendamping. Ini penting karena salah satu indikator keberhasilan pemberdayaan ini adalah kegiatan dilakukan atas dasar masalah dan kebutuhan masyarakat.

Secara konseptual, pemberdayaan yang diterapkan dalam kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kekuasaan dan wewenang yang lebih besar bagi masyarakat, khususnya bagi penyelenggara pemerintahan. Upaya ini dilakukan dengan menciptakan masyarakat yang memiliki pengaruh dan kemampuan untuk mengelola sumber daya yang ada secara efektif. Partisipasi yang kuat dari masyarakat menjadi kunci dalam proses ini, di mana mereka dilibatkan dalam setiap tahap kegiatan pengembangan kapasitas. Tujuan utamanya adalah untuk menuntun mereka memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang relevan dengan kehidupan mereka. Dengan demikian, pemberdayaan ini juga berfokus pada pengurangan hambatan pribadi dan sosial yang mungkin menghalangi masyarakat dalam melakukan tindakan. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi aktor utama dalam pengembangan kapasitas, sehingga mereka dapat merasakan dampak positif dari kegiatan ini secara langsung (Andreas & Savitri, 2016).

Tim pendamping melakukan kegiatan ke dalam dua tahapan utama, di mana pendampingan berfokus pada kepala desa, perangkat desa, badan

permusyawaratan desa, kepala dusun dan pendamping desa. Pada tahap ini, narasumber menitikberatkan transfer wawasan mengenai transformasi digital untuk mendukung layanan di desa. Berbagai best practice di Indonesia disajikan dan disampaikan dengan runut sebagai bahan benchmarking yang kemudian bisa aparatur adopsi sebagai role model. Titik tekan pada tahapan ini adalah mempersiapkan sumber daya manusia karena ini merupakan elemen yang paling mendasar agar pemerintah desa bisa mengadopsi teknologi dan digital di pemerintahan. Kemudian, dilanjurkan dengan pembahasan infrastruktur teknologi pendukung seperti jangan komunikasi, portal layanan publik, manajemen data dan isu krusial berkaitan dengan teknologi informasi.

Tahapan berikutnya dilanjutkan dengan interaksi baik informal maupun formal dengan kelompok pemangku kepentingan dari tokoh masyarakat, orang tua dan segmen pemuda. Partisipasi masyarakat dalam transformasi digital sangat penting untuk memastikan bahwa proses ini inklusif dan bermanfaat bagi semua. Mereka memiliki peran dalam memberikan umpan balik dan evaluasi terhadap Prakarsa digital sekaligus membantu pemerintah daerah dan perangkatnya memahami dampak program digitalisasi. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam forum atau diskusi untuk pengambilan keputusan terkait kebijakan teknologi dapat membantu menciptakan solusi yang lebih baik. Bahkan, mereka berpotensi melahirkan inovasi, kreativitas, dan menjadi kolaborator dalam proyek transformasi digital. Dengan berkontribusi dalam berbagai cara, masyarakat dapat memastikan bahwa transformasi digital berjalan dengan baik, adil, dan sesuai dengan kebutuhan mereka.



Gambar 1: kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lapangan
Sumber: dokumentasi tim



Pasca pelaksanaan kegiatan, tim melakukan evaluasi terhadap semua tahap dan outcome pengabdian. Hasil pengabdian masyarakat yang berfokus pengembangan kapasitas digital bagi pemerintah desa menunjukkan beberapa hasil yang potensial. Ini terlihat dengan adanya peningkatan keterampilan digital pada tahap awal. Kualitas sumber daya manusia merupakan elemen penting dalam mencapai keberhasilan sistem yang diimplementasikan oleh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. SDM yang berkualitas mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan inovasi dalam pelayanan publik (Saragih et al., 2023). Kapasitas aparatur desa yang mengikuti pembekalan meningkat dan mereka mulai terampil dalam menggunakan sumber informasi untuk meningkatkan pengetahuan secara mandiri dalam memanfaatkan teknologi digital untuk menunjang pekerjaan. Hal ini memungkinkan mereka untuk menjalankan tugas pemerintahan dengan lebih efisien. Kemudian, desa mendapat gambaran untuk mulai mengimplementasikan sistem informasi yang memudahkan pengelolaan data dan informasi, seperti data kependudukan, keuangan desa, dan layanan publik. Ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan.

Hasil lain menunjukkan adanya ruang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas pengambilan keputusan. Dengan adanya pemahaman dan kemampuan berinteraksi dengan teknologi digital bagi aparatus, mereka akan mudah mendorong masyarakat agar dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses pemerintahan, seperti dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan. Misalnya, pengambil keputusan akan mudah berinteraksi dengan warganya melalui forum online, survei digital, atau aplikasi yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan.

Pada konteks ini, kesadaran dan literasi digital masyarakat menjadi kunci penting oleh karena itu pembekalan lanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi digital perlu dan penting dilakukan. Kegiatan pendampingan tidak hanya berupa transfer pengatahan, akan tetapi pendampingan dan pelatihan yang secara teknis mentrasnfer dan membekali kemandirian dalam menggali sumber informasi, kecakapan teknis menggunakan perangkat, kepiawaian dalam mengatasi masalah berkaitan dengan teknologi. Selain pemerintah desa siap untuk memulai tahapan transformasi digital, masyarakat juga perlu mendapat pemahaman cara berinteraksi teknologi untuk kepentingan pribadi dan komunitas, serta memanfaatkannya secara positif untuk urusan-urusan publik. Dengan demikian, digitalisasi pemerintahan desa dapat meningkatkan kualitas layanan publik. Di sisi lain, masyarakat juga dapat mengakses informasi dan layanan dengan lebih mudah dan tanpa terikat batasan waktu melalui platform digital, seperti website desa atau aplikasi mobile, yang mempermudah komunikasi antara pemerintah desa dan warganya.

Secara keseluruhan, ini adalah langkah awal pendampingan bagi tim dan

mitra untuk pemerintah desa memulai integrasi teknologi digital dengan semua aspek organisasi pemerintahan. Hasil dari pembekalan ini diharapkan dapat menciptakan pemerintahan desa yang lebih modern, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan meningkatkan kapasitas digital dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, diharapkan pemerintahan desa dapat lebih adaptif terhadap perubahan dan tantangan yang dihadapi. Harapannya, hasil pembekalan ini mampu mendorong aparatur untuk memulai paradigma pembangunan berkelanjutan yang melibatkan digital di tingkat desa. Dengan memanfaatkan potensi lokal dan mengelola sumber daya secara bijaksana, desa dapat mencapai kesejahteraan yang lebih baik tanpa mengorbankan lingkungan. Melalui pendekatan yang inklusif dan partisipasi, diharapkan masyarakat dapat berkontribusi aktif dalam pembangunan desa, sehingga tercipta ekosistem yang saling mendukung antara pemerintah desa dan masyarakat. Ini dapat diraih jika masyarakat memiliki literasi dan pengetahuan yang baik.

PENUTUP

Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk melatih aparatur desa agar terampil dalam menggunakan teknologi digital yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan. Dengan pelatihan ini, diharapkan aparatur desa dapat menguasai berbagai alat dan platform digital yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Hasil dari pengabdian menunjukkan bahwa aparatur desa semakin menyadari pentingnya literasi digital. Kesadaran ini menjadi kunci dalam memulai transformasi digital dan untuk menunjang aktivitas pemerintah yang lebih responsif dan transparan. Dengan kemampuan literasi digital yang baik, aparatur desa dapat memanfaatkan teknologi untuk mempermudah penyelenggaraan layanan kepada masyarakat, seperti dalam pengelolaan data, komunikasi, dan penyampaian informasi. Dengan demikian, peningkatan keterampilan digital di kalangan aparatur desa tidak hanya akan memperbaiki kinerja pemerintahan, tetapi juga akan meningkatkan kualitas layanan publik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan desa.

Meskipun proses pengabdian dilakukan secara partisipasi dan hasil kegiatan menunjukkan progres yang baik, terdapat kelemahan dalam proses riset pra-pengabdian yang perlu diperhatikan. Kelemahan ini terlihat dari kurangnya pemetaan yang solid terhadap identifikasi masalah krusial yang dihadapi oleh mitra. Proses riset yang tidak memadai mengakibatkan pemahaman yang kurang mendalam tentang kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat atau aparatur desa. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas program pengabdian yang dilaksanakan, karena solusi yang ditawarkan mungkin tidak sepenuhnya sesuai



dengan konteks dan kebutuhan nyata di lapangan.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi dan perbaikan pada tahap riset pra-pengabdian di masa mendatang. Dengan melakukan analisis yang lebih komprehensif dan melibatkan partisipasi aktif dari mitra, diharapkan identifikasi masalah dapat dilakukan dengan lebih akurat. Hal ini akan memastikan bahwa program pengabdian yang dirancang benar-benar relevan dan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi mitra.

Ucapan Terima Kasih

Kegiatan pengabdian ini sepenuhnya didanai oleh Universitas Jambi tahun anggaran 2024. Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan selama pelaksanaan kegiatan dilaksanakan. Dengan demikian, tim mengucapkan terima kasih kepada Universitas Jambi atas dukungan fasilitas dan pendanaan, kepada mitra yang secara kooperatif selama kegiatan pengabdian.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas, & Savitri, E. (2016). *Peran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Kabupaten Meranti dan Rokan Hilir*.
- Beriansyah, A., Wahid, M., & Hartati. (2021). Pendampingan pengembangan desa digital melalui komunitas pemuda di desa Pematang Jering kabupaten Muaro Jambi. *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 13–19. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v2i1.913>
- Henry. (2022, January 19). *6 Fakta Menarik Merangin, kabupaten dengan tradisi lebaran yang berusia lebih dari 400 tahun*. Liputan 6. <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4863399/6-fakta-menarik-merangin-kabupaten-dengan-tradisi-lebaran-yang-berusia-lebih-dari-400-tahun>
- Hidayat, A. (2024, January 3). *Indeks pembangunan manusia di Merangin masih rendah, Pinto Jayanegara sebut harus ditingkatkan*. Metro Jambi. <https://www.metrojambi.com/metro/133690363/indeks-pembangunan-m...erangin-masih-rendah-pinto-jayanegara-sebut-harus-ditingkatkan>
- Ibnouf, M. H., Sheqwarah, M. N., & Sultan, K. I. (2015). An Evaluation of the Participatory Learning and Action (PLA) Training Workshop. *Journal of Agricultural Science*, 7(12), 144–150. <https://doi.org/10.5539/jas.v7n12p144>
- Maulana, R. Y. (2022). Collaborative digital transformation pemerintah provinsi Jawa Barat. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33506/jn.v7i2.1784>

- Maulana, R. Y., & Bafadhal, F. (2020). Provision of Access to Information Services Based on E-Government in the Village Government. *Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2019)*, 2019–2223. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200515.037>
- Maulana, R. Y., Rakhman, M. A., Beriansyah, A., & Decman, M. (2023). Scale up digital government transformation in Indonesia, the case of Jambi city. *The 31st NISPacee Annual Conference 2023*, 1–12.
- Mutiarin, D., Yusuf, M., Lega, M., & Habibullah, A. (2024). Agile Bureaucracy in the digital age: Assessing the public service delivery in Jambi city. *International Journal of Public Administration in the Digital Age*, 11(1), 1–17. <https://doi.org/10.4018/IJPADA.356405>
- Saragih, F., Nurmandi, A., Misran, & Subekti, D. (2023). Analysis of human resources in Sorong city regional equipment organization in supporting electronic-based public services. *HCII 2023. Communications in Computer and Information Science*, 1835 CCIS, 262–269. https://doi.org/10.1007/978-3-031-36001-5_34
- Syahputra, D. I., Nurmandi, A., & Subekti, D. (2023). Bibliometric analysis of research publication trends on the ICT use in government institutions from 2015–2022. In M. R. Laouar, V. E. Balas, B. Lejdel, S. Eom, & M. A. Boudia (Eds.), *12th International Conference on Information Systems and Advanced Technologies “ICISAT 2022”*: Vol. 624 LNNS (pp. 54–67). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-25344-7_6
- Wagola, R., Nurmandi, A., Misran, & Subekti, D. (2023). Government Digital Transformation in Indonesia. In C. Stephanidis, M. Antona, S. Ntoa, & G. Salvendy (Eds.), *HCI International 2023 Posters. Communications in Computer and Information Science* (pp. 1–11). Springer. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-031-36001-5_37